

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Dalam proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan desa miskin Kabupaten Purbalingga melalui sektor UMKM menunjukkan bahwa kolaborasi dilihat melalui tiga hal utama yaitu kondisi awal, proses kolaborasi dan ukuran keberhasilan.

1. Kondisi awal

Kondisi awal dapat dilihat dari dua aspek yaitu sejarah masalah dan ketidakseimbangan sumber daya. Berdasarkan penelitian lapangan sejarah masa lalu dapat dipengaruhi kondisi awal dimana konflik masa lalu yang terjadi pada kemiskinan desa tidak mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Hasil yang diberikan melalui program pemberdayaan desa miskin tidak sesuai harapan pemerintah serta warga desa dan pelaku UMKM. Hal ini terjadi karena sebelum dibuatnya program ini warga desa yang masuk ke dalam kategori desa miskin masih belum dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal desanya. Belum adanya fasilitas dan dukungan dari pemerintah yang membuat mereka kebingungan untuk melakukan pemasaran produk yang sudah dihasilkan. Sedangkan ketidakseimbangan sumberdaya dipengaruhi oleh kondisi awal dimana kualitas sumber daya manusia warga desanya masih tergolong rendah. Hal ini yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha dan mengolah sumber daya potensi lokal yang dimiliki.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi awal ini mempengaruhi proses kolaborasi yang dilakukan dalam pemberdayaan desa miskin di Kabupaten Purbalingga, dimana dengan kondisi awal yang terjadi tersebut membuat pemerintah melakukan kolaborasi melalui program pemberdayaan desa. Selain itu kondisi awal juga mempengaruhi ukuran keberhasilan kolaborasi hal ini dapat dilihat dengan dibuatnya program pemberdayaan desa miskin oleh pemerintah yang dilakukan

melalui sektor UMKM Kabupaten Purbalingga guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kondisi awal.

2. Proses kolaborasi

Pada proses kolaborasi dibagi menjadi tiga tahap diantaranya yaitu tahap dialog tatap muka dan membangun kepercayaan. Dialog tatap muka yang dilakukan oleh stakeholders yang terlibat dilakukan menggunakan dialog langsung melalui pertemuan dengan semua pihak yang terlibat. Namun kegiatan tersebut hanya berjalan di awal saja., sedangkan sampai saat ini dialog tatap muka tetap dilakukan namun bersifat fleksibel yaitu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dan kepentingan saja.

Pada tahap selanjutnya adalah membangun kepercayaan dimana dalam tahap ini membangun kepercayaan semua stakeholders memiliki persepsi dan tujuan yang sama serta saling memiliki kepercayaan dan terbuka terhadap pemberian informasi satu sama lain.

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa tahap proses kolaborasi ini dipengaruhi oleh kondisi awal yang terjadi yaitu adanya sejarah konflik. Masalah dan ketidakseimbangan sumberdaya yang ada. Selain itu proses kolaborasi juga mempengaruhi ukuran keberhasilan kolaborasi, hal ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama antar stakeholders dalam proses collaborative governance sehingga program pemberdayaan desa ini dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ada di desa tersebut.

3. Ukuran keberhasilan

Dalam menentukan ukuran keberhasilan berdasarkan teori yang digunakan menyebutkan bahwa terdapat indikator penting yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi yang meliputi, pertama jenis struktur jaringan dimana dalam kolaborasi pemberdayaan desa miskin melalui sektor UMKM di Kabupaten Purbalingga memiliki bentuk struktur lead organization yaitu bentuk struktur jaringan dimana penanggungjawab ada pada satu pihak saja. Dalam jenis struktur pada

proses kolaborasi ini terdapat unsur hirarki dilihat dari pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang dilakukan yaitupemerintah sebagai penanggungjawab penuh atas program ini.

Indikator kedua yaitu, komitmen terhadap tujuan pada indikator komitmen terhadap tujuan stakeholders yang terlibat memiliki alasan mengapa dilakukannya proses kolaborasi ini yaitu untuk pemberdayaan desa melalui sektor UMKM di Kabupaten Purbalingga dan semua pihak memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan yang positif.

Indikator terakhir adalah yaitu adanya sikap saling percaya antar stakeholders dimana dalam proses kolaborasi ini stakeholders saling memiliki kepercayaan satu dengan lainnya. Kepercayaan dapat dilihat dari keterbukaan informasi dan ketergantungan stakeholders yang terlibat.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian *collaborative governance* dalam pemberdayaan desa miskin di Kabupaten Purbalingga maka implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu:

1. Perlu adanya forum komunikasi dan jadwal rutin pertemuan antar semua pihak kolaborasi, yang dapat meningkatkan tercapainya tujuan. Pada proses dialog tatap muka perlu membedakan Antara komunikasi dan negosiasi dengan aspek lain yaitu sosialisasi. Hal tersebut disebabkan karena aktifitas sosialisasi lebih cenderung dilakukan dengan metode komunikasi satu arah, dan dilakukan satu arah dari sektor yaitu pemerintah sehingga kelompok sasaran cenderung lebih pasif. Padahal tujuan dari dialog tatap muka dilakukan adalah untuk menimbulkan komunikasi dua arah. Dengan komunikasi dua arah akan membawa pertemuan ke forum *deliberative* yang disertai adanya proses negosiasi. Sehingga perlu ditekankan bahwa aspek yang utama perlu dibangun oleh pemerintah pada program-program berbasis kolaboratif menempatkan dialog tatap muka bukan hanya melalui komunikasi dalam bentuk

sosialisasi tetapi perlu adanya proses negosiasi agar forum yang dibentuk lebih *deliberative*.

2. Pemberdayaan desa miskin melalui UMKM setiap pihak harus lebih inovatif sehingga tidak mengandalkan beberapa pihak saja untuk menyalurkan inovasi dalam mengembangkan desa melalui sektor UMKM.
3. Diperlukan kesetaraan dalam hal komitmen antara para *stakeholders* yang terlibat demi tercapainya tujuan dari program tersebut.

